



Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Bayu Nurrohman¹, Yeby Ma'asan Mayrudin^{1*}, Dewi Sri Astuti¹, Renata Maharani¹

¹Department of Government Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa, 42117, Banten-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Sep 04, 2022

Diterima: Jan 25, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Aktivisme; Fenomenologi;
Partai Politik; Perempuan;
Politisi Perempuan;

Koresponden:

Yeby Ma'asan Mayrudin

Department of Government
Science, University of Sultan
Ageng Tirtayasa

Email: yeby@untirta.ac.id

Sitasi Cantuman:

Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*. 4(2); 137-151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.81>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.81>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The focus of this article examines the political activism of women party cadres or women politicians in the Banten area. The urgency of this study is due to the intersection of discourse between women's activism, party organization, and patriarchal culture in the Banten region, in Indonesia in general. We use a qualitative method with the Creswell phenomenological approach. The results of the research are findings about the meaning of political activism from women politicians meaning that women struggle to achieve gender justice and pro-women policies. Furthermore, the reconstruction and projection of the thoughts of women politicians in politics and government, namely: (1) holistic efforts to build representative awareness and the potential of women politicians in political parties; (2) optimizing affirmative action policies in politics and governance as a whole; (3) full support from political parties and their elites in providing proportional opportunities and opportunities for women politicians.

Abstrak Fokus tulisan ini menyelidik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di wilayah Banten khususnya, di Indonesia pada umumnya. Kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Creswell. Adapun hasil penelitian yaitu temuan soal pemaknaan aktivisme politik dari politisi perempuan berarti perempuan berjuang demi mencapai keadilan gender dan kebijakan-kebijakan pro-perempuan. Selanjutnya rekonstruksi dan proyeksi dari pemikiran politisi perempuan dalam politik dan pemerintahan, yaitu: (1) upaya holistik membangun kesadaran representatif dan potensi politisi perempuan di tubuh partai politik; (2) optimalisasi kebijakan *affirmative action* di bidang politik dan pemerintahan secara keseluruhan; (3) dukungan penuh dari partai-partai politik dan elitnya dalam memberikan kesempatan dan peluang yang proporsional terhadap politisi perempuan.

Tentang:

Yeby Ma'asan Mayrudin, menyelesaikan studi S2 (Magister) di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Bayu Nurrohman, menyelesaikan studi S2 (Magister) di Universitas Padjadjaran. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dewi Sri Astuti, Saat ini sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Renata Maharani, Saat ini sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PENDAHULUAN

Manifestasi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender masih memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan (Godjali & Mayrudin, 2020; Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022; Pick, 2017; Shaya & Abu Khait, 2017; Supriyadi, et.al, 2019; Susanto, 2015; Zuhriyah, 2018). Hal demikian kerap terjadi dikarenakan eksistensi perempuan seolah “*dihadirkan tapi tidak diharapkan*” (Mayrudin et al., 2022). Selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilihan apabila memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dengan dasar penentuan undang-undang ini dapat menjadi landasan kokoh atas urgensi keterwakilan perempuan. Bukan hanya kehadiran dengan wujud jumlah yang patut untuk upayakan. Melainkan eksistensi dan peran yang dijalankan kaum perempuan sebagai upaya memenuhi kepentingannya merupakan hal terpenting (Adji et al., 2009; Thaharah & Rizky, 2022; Zuhriyah, 2018). Konstruksi keadilan perempuan dan pengarusutamaan gender perlu secara terus menerus disegarkan sebagai perjuangan dalam setiap proses kebijakan.

Dengan demikian kehadiran perempuan dalam politik praktis sesungguhnya terlegitimasi berdasar perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Akan tetapi, pengejawantahannya cenderung seperti “*pseudo belaka*”. Para perempuan memang benar sudah diberikan posisi atau tempat khusus pada kepengurusan partai dan juga politik afirmasi di penomoran urut calon anggota legislatif. Namun pada praktiknya sungguh terkesan sekedar untuk memenuhi dan menggugurkan kewajiban partai-partai politik semata. Seyogyanya eksistensi dan pelibatan kaum perempuan di tubuh partai untuk mewujudkan kebijakan dan program-program berbasis pengarusutamaan gender dan keadilan bagi perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Atas dasar itu, diskursus dan pengejawantahan pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Utamanya soal bagaimana gender dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik dianggap menjadi salah satu hal yang dapat mendorong eksistensi kesetaraan perempuan dan momentum dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan tidak hanya di ranah publik maupun pada tataran kebijakan publik. Namun pada beberapa tempat, pengarusutamaan gender masih terbentur pada beberapa nilai dan budaya patriarki yang memposisikan perempuan tidak pada level yang bisa sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Budaya dan nilai-nilai patriarki seringkali menciptakan kondisi eksklusif politik terhadap aktivitas dan peran sentral perempuan (Godjali & Mayrudin, 2020; Nimrah & Sakaria, 2015; Supriyadi et al., 2019; Wahyudi, 2019). Padahal kaum perempuan tidak boleh dihadirkan hanya untuk mengurus ranah domestik. Akan tetapi juga kebutuhan gagasan, ide, dan perannya dalam urusan-urusan publik.

Kajian ini menjadi penting untuk ditelisik disebabkan adanya tautan antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan patriarki di Indonesia khususnya di wilayah Banten. Tentu saja, ketika isu gender ditawarkan, seringkali hal ini berujung pada pengucilan atau bahkan penolakan, karena kultur patriarki masih mendarah daging di masyarakat. Sebab itu, interseksi antar aktivisme perempuan dan patriarki dikhawatirkan semakin menggerus keadilan gender. Oleh karena itu, perlu upaya dekonstruksi dimulai dari menyelisik konstruksi gagasan para kader perempuan di partai-partai politik Banten soal aktivisme politik. Aktivisme politik yang diaktivasi oleh kaum perempuan menyajikan *counter narrative* dan menawarkan keadilan informasi publik yang berpihak pada pengakuan eksistensi kaum perempuan dalam politik pemerintahan.

Dalam kajian Ilmu Politik, kajian ini mencoba memperkaya khazanah tentang aktivisme politik kaum perempuan dalam berperan di kancah kepolitikan melalui partai-partai politik dan mendobrak budaya patriarki yang hegemonik di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, wacana jenis ini harus secara masif diusung untuk memerangi patriarki dan memperjuangkan keadilan gender, serta untuk menjaga sejarah kehadiran dan peran perjuangan perempuan dalam segala

Bayu Nurrohman, Yeby Ma’asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jangan menjadi –meminjam istilah Weatherford– “*Bab yang Hilang*” (Godjali & Mayrudin, 2020). Atas dasar itu, kajian ini dinilai penting untuk melakukan identifikasi, analisa, dan perspektif terhadap aktivisme politik para politisi perempuan di partai-partai Banten.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendalami pengalaman dan pemaknaan individu (Creswell, 2013) atas aktivisme politisi perempuan dalam partai politik di Banten. Atas dasar itu, metode tersebut bermanfaat untuk memahami, menggali, dan mengungkap persoalan tertentu dari apa yang diteliti (Mayrudin, et.al, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber primer yaitu mewawancarai narasumber beberapa politisi perempuan Banten dari partai yang berbeda. Kemudian juga menggunakan sumber sekunder yang memanfaatkan literatur dan data dari situs yang relevan.

Adapun teknik analisisnya mendasar pada cara fenomenologis yang diformulasi oleh (Creswell, 2013) dimulai dari *epoche* (pengurangan subyektif peneliti), *significant statement* (mencermati pernyataan penting dari informan), *meaning unit* (memahami unit makna informan), *textural description* (deskripsi tekstural soal apa yang dialami oleh para informan), sampai *structural description* (deskripsi struktural tentang pengalaman mereka terkait bagaimana mereka mengalaminya dalam sudut pandang kondisinya, situasinya, dan konteksnya). Kelima hal tersebut telah kami upayakan dioperasionalisasi dalam membedah persoalan eksistensi politisi perempuan dalam tubuh partai-partai politik di Banten. Atas dasar itu, penyajian dan analisa teoretis tidak dipaparkan dalam kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivisme Politik Menurut Politisi Perempuan Banten

Politisi perempuan merupakan individu atau sekumpulan individu berjenis kelamin perempuan yang aktif pada partai-partai politik. Bersandar pada perspektif Simone de Beauvoir (Tong, 1998; Walters, 2021) tentang perempuan mandiri yang disebutnya “... *ingin menjadi aktif, pengambil, dan menolak kepasifan yang didesakkan pria kepadanya*”. Sedangkan pemaknaan partai politik dalam kajian ini lebih memilih pada redefinisi yang diformulasi oleh Yeby Ma’asan Mayrudin dan Bayu Nurrohman yang menanamkan nilai feminisme dalam memaknai partai politik. Berlandas pada Mayrudin dan Nurrohman (2022) partai politik merupakan kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan dan kaum peduli *gender mainstreaming* agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan (Mayrudin et al., 2022).

Dengan demikian, partai sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui peran anggota-anggota partainya. Politisi perempuan beranggapan bahwa partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus dalam bidang politik dan mereka punya visi misi tertentu untuk mewujudkannya melalui anggota-anggotanya. Berdasar pada hasil olahan data secara fenomenologis diperoleh kesimpulan bahwa politisi perempuan tertarik masuk dalam partai politik cenderung mendasari pada empat alasan, yaitu: (1) reformasi sistem pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik.



Gambar 1 Empat Alasan Perempuan Menjadi Politisi di Partai Politik

Pertama, reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses kebijakan publik yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Karena dengan politik, mereka beranggapan bahwa bisa mengubah tatanan kenegaraan pemerintah dan sosial. Salah satu buktinya dalam satu pemerintah, kepala daerah itu merupakan hasil politik tapi dia bisa mengubah seluruh tatanan pemerintah, mulai dari RPJMD hingga kebawahnya. Kebijakan publik saja jika sudah diwarnai politik maka akan berubah hasilnya. *Kedua*, aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan. Mereka ingin mengaktualisasikan diri mereka sebagai perempuan dalam tubuh partai politik. Mereka menganggap dengan keterlibatan kader perempuan dalam partai politik mampu menyerap aspirasi kaum perempuan dan menyuarakannya dengan lebih jelas karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya bisa lebih dipahami oleh perempuan itu sendiri. Banyak sekali permasalahan perempuan yang harus diselesaikan tapi perempuan lebih bisa memahami bagaimana cara menyelesaikannya karena mereka turut merasakannya. Seperti keselamatan ibu melahirkan. Hal ini penting karena angka kematian ibu saat melahirkan masih tinggi. Ketika politisi perempuan yang memikirkannya, akan lebih bisa mendorong percepatan kebijakan tentang jaminan persalinan dan program-program yang mampu meningkatkan persalinan ibu melahirkan. Terlebih angka harapan hidup menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia.

Ketiga, keberdayaan sebagai politisi perempuan. Mereka ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa terlibat aktif dalam politik secara praktis. Mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan sesuatu dalam politik sama halnya ketika peran itu dijalankan oleh laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama karena pada dasarnya peran dalam politik tidak ditentukan keberhasilannya oleh gender. Namun bagaimana manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Provinsi Banten sendiri terdapat beberapa figur yang mampu menginspirasi banyak perempuan untuk terjun ke politik karena peran dan kontribusinya yang cukup besar bagi perempuan seperti Nurul dari Partai Keadilan Sejahtera dan Encop Sovia dari Partai Gerindra. Sementara untuk kecenderungan memilih bergabung dengan partai tertentu sangat dipengaruhi oleh kesamaan dengan visi dan misi partai politik. Ketika perempuan lebih menyukai partai nasionalis maka cenderung akan masuk ke dalam partai yang berbasiskan nasionalisme. Sementara perempuan yang memaknai dirinya cocok dengan partai yang

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

berbasiskan agama maka cenderung akan bergabung dengan partai yang berbasiskan agama. Tidak serta merta seluruh perempuan masuk dalam politik karena untuk eksistensi saja, namun mereka masuk dengan berbagai pertimbangan utamanya ideologi partai. Mereka akan lebih nyaman berada pada partai politik yang memiliki garis-garis kebijakan yang sesuai dengan harapan yang mereka bayangkan. Hal ini dapat mendorong terciptanya aktualisasi politik kader perempuan yang lebih tinggi pada tubuh partai politik.

Keempat, memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan bahwa *mindset* dan keterampilan peran perempuan yang bisa lebih diberdayakan. Dengan terjun ke dunia politik dalam praktiknya secara pemikiran dan aktivitas lebih diberdayakan baik untuk kader-kader perempuan partai politik maupun untuk perempuan lainnya. Kader perempuan akan peka terhadap kebutuhan kaum perempuan lainnya, baik kebutuhan secara materil maupun immateril. Maka, mayoritas politisi perempuan akan menggunakan pendekatan yang akan membawa aktifitas dan kreatifitas kaum perempuan lainnya ke arah yang lebih berdaya dan massif.

Selanjutnya mari kita telusur soal pemaknaan aktivisme politik para politisi perempuan di Banten:

Tabel 1 Pemaknaan Aktivisme Politik Menurut *Key Informant*

Informan Kunci	Pemaknaan Aktivisme Politik
Rika (Partai Gerindra)	“Peran aktif dalam berpolitik itu bisa jadi sebuah proses yang berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu kebijakan dari kekuasaan yang kita miliki, misalnya kekuasaan anggota DPRD. Kita menjalankan fungsi itu dengan baik dan sesuai aturan dan fokus pada kebijakan yang membantu masyarakat. Misalnya sepeda listrik untuk RT RW, memang iya itu dibutuhkan, tapi untuk masyarakatnya apa? Kita aktif berpolitik tetap tidak melanggar kaidah-kaidah partai politik kita. <i>Aktivisme politik yaitu menjalankan kegiatan politik yang berdasarkan pada tujuan kita dan kebijakannya lebih kepada masyarakat. aktivitasnya yaitu menyerap aspirasi dan mengimplementasikan aktivisme politik.</i> ”
Erna (PKS)	“Sebetulnya zaman dulu juga, zaman Rasulullah politik itu bukan hal yang tabu, politik itu bagaimana caranya kita mengajak orang dalam kebaikan, seperti itu. Di zaman Rasulullah para perempuan juga terlibat aktif dalam politik ketika dalam peperangan, bagian kesehatannya atau bagian yang mendampingi ketika para sahabat terluka dan itu juga menjadi bagian dari politik sebetulnya ini jangan di kalau di tabu. Kita kadang beranggapan Perempuan udah sekolah tinggi-tinggi paling di dapur, di sumur dan di kasur. <i>Sebetulnya tanggungjawab kita sebagai perempuan itu ya banyak, bukan hanya untuk urusan keluarga saja. Kita terjun ke masyarakatpun</i>

	<i>mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik. Makanya, sebagai seorang perempuan hukumnya wajib mungkin tapi, dengan syarat-syarat tertentu seperti harus ada izin suami.”</i>
Emuy (PDI Perjuangan)	<i>“Kalau di partai politik dalam rapat suarakan saja apa yang kita anggap baik, buat jadi suatu keputusan kalau ga disuarakan ga di denger harus ngomong, mana orang tahu kalau kita ga ngomong. Perempuan di belakangkan sama laki laki dalam rapat. Di partai politik tuh pleno ga usah salah-salah, berpolitiklah yang sopan biar kita bisa gitu menempatkan diri.”</i>

Sumber: Tim Penulis, 2023

Sementara konsep aktivisme politik menurut *key informant* pertama dimaknai sebagai peran aktif dalam berpolitik yang berkaitan dengan bagaimana membentuk suatu kebijakan dari kekuasaan yang dimiliki. Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa politik pada akhirnya merupakan proses merubah tatanan sosial melalui kebijakan publik. Maka pemaknaan aktivisme politik lebih kepada peran individu berupaya untuk menjalankan fungsi mereka baik sebagai kader maupun anggota parlemen secara profesional dengan mendorong adanya pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat.

Sementara politisi perempuan yang berasal dari partai berbasis agama menyampaikan jika aktivisme politik merupakan peran yang membantu kepentingan politik untuk kemenangan bersama. Mereka berpendapat jika perempuan dalam politik sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Perempuan terlibat aktif dalam peperangan sebagai pihak yang mendampingi para sahabat dan kaum yang mengalami luka saat perang. Dengan perempuan terjun ke masyarakat dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan pun termasuk bagian dari politik, maka sebagai seorang perempuan hukumnya wajib untuk terjun ke politik, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Kemudian, politisi perempuan dari PDI-P beranggapan bahwa aktivisme politik berarti adalah peran kader khususnya perempuan untuk menyuarakan yang dianggapnya baik sampai mencapai sebuah keputusan. Pada dasarnya politisi perempuan memaknai aktivisme politik sebagai sebuah peran dan kontribusi yang mereka berikan sebagai kader dari partai politik dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang optimal pada pemenuhan hak-hak perempuan di ruang publik.

Aktualisasi Peran, Eksistensi, & Aktivitas Politisi Perempuan Banten

Perempuan dalam memimpin tidak berbeda dengan laki-laki, mereka juga dituntut hal yang sama sebagai seorang pemimpin untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik guna membangun daerahnya dengan lebih baik (Nurrohman & Mayrudin, 2021). Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan eksekutif yang tinggi. Provinsi Banten bila dilihat pada keterwakilan perempuan pada ranah eksekutif tentu menampilkan fakta yang baik. Saat ini, dari jumlah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat 3 pemimpin perempuan yaitu Irna Narulita sebagai Bupati Pandeglang, Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak, dan Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang. Bahkan pada periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya terdapat 4 pemimpin perempuan di Banten dengan ditambah Airin Rachmi Diani

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

sebagai Walikota Tangerang Selatan. Fakta ini menampilkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah di Provinsi Banten mencapai angka 50% yang merupakan capaian yang tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Meskipun para kepala daerah perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memang terlahir dari sebuah kekuatan dinasti politik, namun hal ini tetap tidak menafikan fakta bahwa ternyata perempuan dan kepemimpinan perempuan bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Para kepala daerah perempuan terpilih inipun tetap dituntut untuk mendorong kemajuan daerahnya mengingat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang masih perlu melompat dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan strategis seperti kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun berbeda dengan keterwakilan pada ranah eksekutif, pada ranah legislatif keterwakilan perempuan di Provinsi Banten masih belum mampu bahkan mencapai angka 30%. Keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Banten sebagai anggota legislatif masih rendah yaitu hanya diwakili 15 anggota parlemen perempuan dibandingkan dengan keterwakilan anggota parlemen laki-laki sebanyak 70 orang dari total keseluruhan anggota legislatif DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang. Angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen di Provinsi Banten baru mencapai 17,65%. Data mengenai anggota legislatif perempuan di Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Prov. Banten 2019-2024

1	Dra. Encop Sophia, S.Ag., M.A.	GERINDRA
2	Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si.	GERINDRA
3	Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si	PDIP
4	Indah Rusmiati, S.IP.	PDIP
5	Sri Hartati, S.H.	PDIP
6	Desy Yusandi, S.E.	GOLKAR
7	Hj. Ella Silvia, Sh., MH	PAN
8	Hj. Anita Indah Wati, SE	PDIP
9	Ria Mahdia Fitri, S.Sos.	NASDEM
10	A. Cut Muthia Ahmad M	PKS
11	Maretta Dian Arthanti, Psi	PSI
12	Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd.	PPP
13	Nurul Wasiah, A.Md. Keb	PKS
14	Hj. Ida Ating, S.IP.	PPP
15	Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani	PKS

Sumber: (Puskapol UI, 2019)

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa Partai PDI Perjuangan menjadi penyumbang terbesar anggota legislatif perempuan sebanyak 4 orang, disusul oleh PKS yang meloloskan 3 orang. Sementara Partai Gerindra dan PPP meloloskan 2 orang. Dari data tersebut memang masih menggambarkan betapa sulitnya keterwakilan perempuan menembus angka 30% Pada keanggotaan legislatif di Provinsi Banten.

Sementara untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten juga belum ada yang mencapai 30%. Di Kabupaten Lebak untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 7 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Di Kabupaten Serang Untuk keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 13% dari jumlah anggota. Kabupaten Pandeglang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD periode 2014-2019 sebanyak 6 orang dari jumlah seluruhnya 50 anggota DPRD atau sekitar 14% dari jumlah keseluruhan. Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah 12 anggota legislatif perempuan dari jumlah 50 anggota atau sekitar 24%. Di Kota Serang terdapat

5 anggota legislatif perempuan dari jumlah 45 atau sebesar 12%. Kota Cilegon terdapat 4 anggota legislatif perempuan dari jumlah 40 atau sebesar 10%. Kota Tangerang memiliki jumlah 6 anggota legislatif perempuan dari total 50 anggota parlemen atau sebesar 12%. Dan Kabupaten Tangerang terdapat 7 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan anggota parlemen atau sebesar 13%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sampai di tingkat daerah pun memang keterwakilan perempuan di parlemen belum mampu bahkan mencapai seperempatnya dari keseluruhan jumlah anggota parlemen.

Kurang berjalannya mesin partai dalam mengorbitkan calon legislatif perempuan yang kompetitif pada gelaran pemilihan umum legislatif menjadi salah satu permasalahan internal yang harus diselesaikan oleh partai politik. Terbatasnya sumber daya juga disebabkan oleh masih minimnya minat dari perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas politik elektoral dan menggunakan hak politiknya untuk dipilih. Kedua permasalahan tersebut menjadi hal yang berkesinambungan, yang sebetulnya momentum pengarusutamaan gender dan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif harus bisa dimanfaatkan untuk menjaring lebih banyak potensi-potensi perempuan untuk bisa lebih aktif dan memiliki aktivitas politik. Padahal bila dilihat keterwakilan perempuan dalam politik bisa membuka peluang untuk mengembangkan minat dan menginspirasi perempuan lain untuk berkarir di politik dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan.

Dari jumlah anggota parlemen perempuan yang terpilih di parlemen merupakan sebuah tonggak harapan bagi masyarakat terutama perempuan agar mampu lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan di ranah kebijakan publik. Hal ini karena mereka sebagai anggota parlemen memiliki fungsi yang salah satunya adalah menyusun kebijakan. Penyusunan kebijakan tentu didahului oleh berbagai masukan aspirasi dari kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat secara luas. Posisi anggota parlemen yang strategis diharapkan mampu menghimpun dan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, juga mampu mendorong perempuan lebih mengambil posisi yang aktif baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Hanya saja apabila melihat kondisi saat ini masih sulit untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam politik dengan berbagai keterbatasan yang dialami dan dihadapi oleh perempuan di Provinsi Banten. Budaya patriarki dan nilai-nilai kepercayaan yang terkadang membatasi aktivitas perempuan untuk aktif dalam perpolitikan di daerah. Namun sebetulnya dengan keterwakilan perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut. Untuk itu perlu untuk diketahui sejauh mana aktivitas politik yang mereka lakukan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh anggota parlemen perempuan di Provinsi Banten melalui lembaga Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melaksanakan berbagai kegiatan dalam meningkatkan edukasi dan pemberdayaan terhadap perempuan diantaranya adalah kegiatan evaluasi perkembangan politik daerah, konsolidasi, dan seminar. Selain itu, dalam mendorong pemberdayaan perempuan, DPRD Provinsi Banten juga bersinergi dengan DPW Komite Muda Perempuan Indonesia Provinsi Banten.

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Aktualisasi merupakan sebuah aksi dalam mencapai sesuatu yang diharapkan sesuai dengan nilai yang diyakini itu benar. Kedua informan menyampaikan jika mereka memiliki harapan dan keyakinan yang tinggi ketika mereka bergabung dengan partai politik. Mereka berharap bahwa kepentingan-kepentingan perempuan bisa lebih banyak disuarakan dan diperjuangkan mulai dari internal partai politik dimana mereka bergabung. Namun mereka juga tidak menutup fakta bahwa tidak semua perempuan yang tergabung dalam partai politik memiliki keyakinan dan harapan yang sama tentang perjuangan hak kaum perempuan. Tidak sedikit juga kader perempuan di tubuh partai yang berpikir sangat politis sehingga tidak banyak berkibrah untuk kepentingan-kepentingan perempuan. Padahal menyuarakan kepentingan perempuan melalui komunikasi politik perempuan dalam tubuh partai politik merupakan sebuah upaya eksistensi politik. Kemauan untuk mengaktualisasikan diri dalam partai politik inilah yang kemudian mendorong adanya eksistensi dan aktivitas kader perempuan. Eksistensi tentu diperlukan untuk membumikan bahwa kader perempuan dalam partai politik tidak melulu hanya sebagai simbol dan pelengkap administrasi kepartaian saja, tapi jauh lebih dari itu mampu memberikan sebuah sumbangsih nyata dalam mendorong peningkatan kualitas partai politik. Semakin besar peran yang dimiliki oleh perempuan dalam partai politik akan semakin memudahkan penyelesaian permasalahan aksesibilitas dan kesetaraan gender dalam politik. Semakin banyak informasi dan fakta tersebar luas tentang eksistensi kader perempuan di partai politik tentu akan semakin banyak menyulut dan menginspirasi pihak lainnya untuk turut serta bergabung dalam pengembangan diri dan juga partai politik (Thaharah & Rizky, 2022). Sebaliknya ketika perempuan hanya sebagai pelengkap atau bahkan berada di luar partar politik dan parlemen akan semakin sulit menunjukkan pentingnya politik perempuan dalam peta perpolitikan lokal dan nasional.

Para politisi perempuan di Banten tidak hanya aktif berpolitik dalam partai politik dan parlemen saja, melainkan beberapa dari mereka juga aktif dalam kelembagaan dan organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Aktivitas politik perempuan dalam partai politik adalah dengan mendorong partai politik untuk lebih berperspektif gender. Selain itu, politisi perempuan dalam partai politik biasanya lebih fokus pada isu-isu perempuan seperti melakukan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan yang akan menciptakan perempuan lebih mandiri merupakan salah satu upaya yang perlu secara terus menerus dilakukan. Aktivitas politik dalam tubuh partai politik akan lebih memberikan warna dalam partai politik. Selain itu secara politik, mereka juga mendorong simpatisan perempuan lebih mendekat ke partai yang akan berdampak pada peningkatan suara partai pada pemilihan umum selanjutnya. Aktivitas perempuan dalam partai politik sangat perlu dilakukan karena fungsi Perempuan dalam partai politik sebagai bagian yang mewarnai kebijakan dalam partai karena partai butuh keseimbangan dalam artian perempuan dapat menyeimbangkan program-program tentang perempuan dan anak yang kadang dieksklusi oleh laki-laki karena lebih berpikir nir-gender.

Aktivitas perempuan sebagai anggota parlemen adalah mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan berperan agar kebijakan yang dikeluarkan adalah upaya untuk melindungi dan membuat ruang-ruang bagi perempuan terbuka lebih luas dan lebih nyaman. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Dengan telah ditetapkannya kebijakan ini berarti pemerintah telah mendorong kepentingan perempuan di daerah yang diatur kuat dengan produk hukum. Kebijakan ini dikeluarkan akan memengaruhi kebijakan-kebijakan lain dibawahnya seperti penyusunan anggaran juga lebih bisa responsif terhadap gender. Kemudian program-program pemberdayaan perempuan juga akan lebih banyak muncul. Intinya kesadaran tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi lebih mudah diakomodir di level pemerintahan daerah.

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)					
	Perempuan			Laki-laki		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Kab Pandeglang	14.00	14.00	12.00	86.00	86.00	88.00
Kab Lebak	8.00	8.00	10.00	92.00	92.00	90.00
Kab Tangerang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kab Serang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kota Tangerang	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	88.00
Kota Cilegon	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	90.00
Kota Serang	13.33	13.33	13.33	86.67	86.67	86.67
Kota Tangerang Selatan	30.00	32.00	32.00	70.00	68.00	68.00
Provinsi Banten	17.65	17.65	17.65	82.35	82.35	82.35

Sumber: BPS Provinsi Banten

Gambar 2 Presentasi Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin

Aktivisme kader perempuan dalam politik juga dimaknai sebagai suatu bentuk untuk menyelaraskan kepentingan perempuan yang kerap kali terabaikan. Kebanyakan dari politisi perempuan juga akan memiliki aktivitas lain di luar partai politik dengan bergabung dengan organisasi yang aktif dan focus terhadap perempuan, hal tersebut dilakukan agar bisa lebih dekat dengan perempuan secara emosional dan melakukan gerakan yang lebih maju secara bersama-sama. Anggota parlemen perempuan banyak yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Melalui KPPI banyak menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. KPPI juga banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan karena memiliki focus yang sama. Aktivitas KPPI ini dinilai baik karena dapat mendorong kepentingan perempuan secara terorganisir karena didukung oleh kelembagaan yang kuat dan diisi oleh sumber daya yang sama-sama sangat memahami bagaimana kebutuhan perempuan dan cara memenuhinya.

Rika Kartikasari (Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang) hadir pada Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kab. Pandeglang organisasi terdiri atas anggota parlemen perempuan secara non-struktural dengan agenda aspirasi terfokus pada perspektif perempuan dalam proses legislasi dan politik. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia ditujukan menjadi wadah bagi semua perempuan yang memiliki minat berpolitik dengan agenda aspirasi suara perempuan suara perubahan. Realitasnya perempuan hadir dalam politik dari dua alasan yakni keluarganya berkecimpung dalam politik atau memiliki materi sebagai modal *money is power*, sehingga tidak datang dengan motivasi yang berorientasi pada kepentingan perempuan diranah publik, Kaukus ditujukan untuk membentuk solidaritas dengan berlandaskan pada kesamaan gender memaknai kehadiran perempuan dalam politik yang masih terbatas jumlahnya dengan keaktifan perempuan (Kppbanten, 2021).

KPPI memiliki berbagai kegiatan pada beberapa bidang seperti partisipasi politik, ekonomi perempuan, dan jurnalisme perempuan. Beberapa aktivitas kader perempuan dalam KPPI pada bidang partisipasi politik menyelenggarakan aktivitas penguatan sosialisasi gender dan politik di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Banten. Di tengah fakta bahwa keterwakilan perempuan dalam tubuh partai politik dan parlemen masih minim, kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas politik perempuan yang perlu mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara pada bidang ekonomi perempuan, KPPI menyelenggarakan pelatihan industri rumahan dengan sasaran adalah ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam menjalankan aktivitas di luar rumah karena kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

KPPI juga menyelenggarakan pelatihan *digital marketing* dengan tujuan yang sama agar semua perempuan di Provinsi Banten bisa lebih produktif memasarkan produknya meskipun dikerjakan dari dalam rumah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi yang saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dialami banyak kaum perempuan di Provinsi Banten.

Di samping itu, dalam bidang jurnalisme perempuan, KPPI menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik dengan tujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada perempuan untuk bisa mengelola informasi dengan baik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Selain itu KPPI juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan public speaking yang juga sasarannya adalah perempuan di Provinsi Banten. Kegiatan ini tentu mendorong perempuan untuk bisa lebih berkomunikasi dengan baik di tengah tantangan global. Dengan adanya berbagai pelatihan jurnalistik tentu diharapkan akan perempuan akan lebih banyak menyampaikan pendapatnya dan bersuara lebih banyak untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Banten. Dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPI memberikan gambaran bahwa kader partai politik dan anggota parlemen perempuan beberapa telah aktif melaksanakan aktivitas yang mendorong pemberdayaan perempuan di Provinsi Banten.

Hal tersebut membuktikan bahwa secara kualitas perempuan juga bisa setara atau bahkan lebih mengungguli laki-laki perihal kepemimpinan, pembentukan karakter, pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup, dan lainnya. Keterlibatan peran dan aktivitas perempuan dalam politik juga akan menjaga bahkan meningkatkan eksistensi partai politik yang menjadi wadahnya. Dengan begitu, *goals point* dari masing-masing kepentingan partai politik akan terpenuhi.

Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Konsep aktivisme politik perempuan harus bisa dimaknai dengan jelas. Hal yang perlu lebih diperjelas bukan hanya dari konseptual melainkan dari praktis dan empirisnya. Politisi perempuan masih banyak yang belum memahami peran mereka dalam partai politik sebagai perempuan seperti apa. Miskonsepsi ini membuat mereka tidak melakukan banyak hal untuk mendorong kepentingan perempuan karena mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya lebih mereka lakukan. Ketika perempuan terpilih menjadi anggota parlemen, tentu saja ada harapan besar dari konstituen perempuan yang telah mendukung untuk diberikan timbal balik berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan merasa lebih baik.

Partisipasi politik perempuan bisa lebih banyak terlihat ketika mereka memiliki peran yang besar juga dalam partai politik dan parlemen. Peran dan kontribusi yang besar akan berdampak peningkatan kesadaran masyarakat secara luas tentang pentingnya penyelesaian permasalahan gender. Namun kenyataannya, beberapa politisi perempuan tidak melakukan aktivitas yang berfokus pada kepentingan perempuan, mereka mengurus hal-hal yang sama pada umumnya yang bersifat global. Padahal ketika para anggota parlemen bersama-sama menciptakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat perempuan, kekuatannya akan lebih besar dibandingkan ketika anggota parlemen perempuan berjalan masing-masing atau berjuang sendiri-sendiri.

Tabel 3 Rekonstruksi Konsep Aktivisme Politik Politisi Perempuan

Optimalisasi Aktivisme Politik	Rekonstruksi Makna
Kesadaran representasi dan potensi kader perempuan di tubuh partai politik	Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik tidak semata-mata sebagai simbol representasi perempuan, mereka perlu menyadari bahwa mereka punya potensi yang banyak, perempuan

Optimalisasi Aktivisme Politik	Rekonstruksi Makna
	perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.
Optimalisasi kebijakan kuota afirmasi 30% perempuan di politik	Partai politik bertugas untuk memberikan pendidikan politik untuk membentuk mindset yang pro gender serta berkewajiban untuk dapat mendorong atau menciptakan perempuan yang layak dipilih dan menciptakan kesadaran perempuan di masyarakat yang patriarki agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.
Dukungan dari partai politik	Untuk menciptakan eksistensi perempuan dalam dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa dan meningkatkan potensi aktivisme politik perempuan perlu dukungan partai politik.

Sumber: Tim Penulis, 2023

Politisi perempuan perlu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam tubuh partai politik tidak semata-mata sebagai simbol representasi perempuan. Mereka perlu menyadari bahwa perempuan memiliki daya dan potensi yang memadai. Potensi dalam mengembangkan diri dan lingkungannya, potensi dalam menyumbangkan pikiran, potensi dalam bertindak, potensi untuk bersama-sama membesarkan kader perempuan dan partai politiknya. Pemberian afirmasi representasi perempuan dalam tubuh partai politik dan calon legislatif ternyata tidak sepenuhnya merubah pola pikir perempuan dalam politik. Ketika kader perempuan sudah merasa bahwa mereka hanya sebagai pelengkap dan merasa inferior dibandingkan dengan laki-laki, maka itulah kesalahan pondasi awal pemikiran kader perempuan yang harus diperbaiki. Perempuan perlu merasa percaya diri karena mereka juga mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih.

Kebijakan kuota 30% perempuan di politik menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Artinya, kebijakan tersebut adalah kesempatan besar bagi para kaum perempuan sekaligus momentum baru bagi partai politik. Pendidikan politik idealnya diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, karena dalam politik masih banyak yang menyalahpahami perspektif gender. Pandangan bahwa perempuan dianggap tidak mampu memimpin bahkan ketika sudah menang dalam pemilihan pun perempuan masih menjadi perbincangan dan keraguan, pandangan-pandangan tersebut seharusnya bisa dihilangkan atau di kesampingkan sehingga kuota afirmasi 30% tidak hanya sebatas pemenuhan kuota dan implementasinya tidak hanya dianggap sebagai pengguguran tanggungjawab saja. Selain memberikan pendidikan politik untuk membentuk *mindset* yang pro gender, partai politik juga berkewajiban untuk dapat mendorong atau menciptakan perempuan yang layak dipilih dan menciptakan kesadaran perempuan di tengah atmosfer patriarki agar tidak membatasi mereka dalam aktivitas politik.

Semakin tinggi tingkat kesadaran politisi perempuan akan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, akan semakin mendorong aktivitas mereka dalam tubuh partai politik. Aktivisme yang mereka lakukan akan meningkatkan eksistensi mereka dalam dunia politik lokal yang juga akan menginspirasi perempuan lainnya dalam berpolitik untuk lebih dewasa. Namun tetap saja secara praktis politisi perempuan tidak bisa sepenuhnya bergerak sendiri. Mereka juga harus didukung secara penuh oleh lembaga partai politiknya. Karena dorongan dan kesempatan dari partai politik tentu akan lebih memudahkan mereka untuk mengaktualisasikan diri mereka secara optimal yang akan juga berdampak pada peningkatan kualitas dari partai politik itu sendiri.

Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani:

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai-partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Partai politik punya peran sentral dalam mendorong peningkatan politik perempuan secara global. Karena politik perempuan tidak bisa lepas dari bagaimana partai politik memberikan ruang kepada mereka. Partai politik bahkan bisa sengat berperan sebagai meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan di ranah publik (Thaharah & Rizky, 2022). Oleh karenanya, garis partai juga harus lebih memperhatikan ruang-ruang suara dan representasi kepada perempuan terlebih dari akar rumput perempuan itu sendiri. Sosialisasi dan pendidikan politik juga perlu lebih ditingkatkan oleh berbagai pihak terlebih partai politik dan juga organisasi masyarakat yang punya isu perjuangan terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Pemahaman tentang budaya perempuan dalam politik juga perlu dirubah seiring dengan makin besarnya minat dan keterlibatan perempuan dalam politik (Bashori, 2018). Beberapa budaya patriarki masih membatasi keikutsertaan perempuan dalam politik praktis dan ini menjadi salah satu faktor penghambat utama keterlibatan perempuan dalam politik. Kesadaran yang tinggi terhadap peran perempuan dalam politik juga akan mendorong peran dan partisipasi perempuan dalam politik praktis baik secara lokal maupun global (Daryono, 2021).

SIMPULAN

Politisi perempuan dalam partai politik memaknai aktivitas mereka sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan perubahan terhadap kualitas hidup perempuan yang sejalan dengan garis-garis dan ideologi partai politik tempat mereka bergabung. Pemaknaan aktivisme politik berpengaruh terhadap bagaimana cara setiap kader untuk memberikan kontribusinya terlebih pada isu tentang perempuan yang juga akan berdampak pada peningkatan suara pemilih untuk partai politik. Aktivisme politik juga dimaknai sebagai sebuah upaya dalam mengaktualisasikan diri mereka dalam partai politik yang berujung pada semakin meningkatnya eksistensi perempuan dalam politik praktis yang diharapkan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk bisa berpartisipasi lebih lanjut dengan bergabung sebagai kader dari partai politik.

Pemaknaan para politisi perempuan mengenai aktivisme politik sesungguhnya bukan sekedar menghadirkan raga kaum perempuan pada tubuh partai-partai politik. Hasil penelitian ini menjadi kajian penting untuk menyadarkan banyak pihak bahwa kajian tentang aktivisme politik politisi perempuan pada partai-partai politik tidak hanya dimanfaatkan sebagai pelengkap *affirmative action* dan penggugur kewajibannya. Melainkan partai membutuhkan gagasan, pemikiran, laku politik, dan aktivisme politik politisi perempuan dalam melakukan institusionalisasi di tubuh partai politiknya. Namun sebetulnya dengan keterwakilan perempuan yang tersedia saat ini di parlemen Provinsi Banten masih memberikan sebuah pengharapan untuk menindaklanjuti persoalan perempuan yang beragam di ranah publik seperti kesetaraan perempuan, pendidikan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan hadirnya keterwakilan perempuan di parlemen dan masuk ke dalam sistem pemerintahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mengurangi kesenjangan dan permasalahan tersebut.

Salah satu aspek yang harus dikritisi adalah bagaimana peran kaum perempuan dalam tubuh partai-partai politik mendorong terciptanya pelembagaan partai dan konsolidasi demokratisasi terkhusus pada isu kesetaraan dan peluang politik yang sama dengan kaum laki-laki. Sebagai sarana demokrasi, partai politik harus menjadi jembatan dan sarana berbagai pihak memberi kesempatan pada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan menciptakan determinan isu kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Kenyataannya, partai politik kini menjadi alat politik para oligarki yang berkuasa dan cenderung memiliki mentalitas patriarki yang masih sangat dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M., Hum, M., Meilinawati, L., Hum, M., Banita, B., Hum, M., ... Sastra, F. (2009). *Perempuan dalam Kuasa Patriarki Oleh : Ketua : Anggota* : 1–108.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third Edit). California: SAGE Publication.
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89–107. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47>
- Godjali, M. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19. *JURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(1), 1–19. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/4456>
- Kppbantén. (2022). *Tentang Mimpi Perempuan Yang Bergerak Dengan Hati*. kppbantén.com. Retrieved October 8, 2022, from <https://kppbantén.com/profil/>
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Nimrah & Sakaria, S. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138. <https://doi.org/10.31947/politics.v1i2.229>
- Nurrohman, B., & Mayrudin, Y. M. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Inna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang. *Administratio*, 12(2), 169–184. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.243>
- Pick, K. (2017). Women, leadership, and power. In *Handbook of Research on Gender and Leadership* (pp. 223–237). Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069647188&partnerID=40&md5=56db50d3c536c86c9d80d985ef2061c2>
- Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing leadership in the Middle East: Emirati women empowerment and leadership style. *Gender in Management*, 32(8), 590–608. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2016-0143>
- Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). The problems of gender equality: A reconstruction of Islamic doctrine. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 91–110. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*, 7(2), 120–130. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Thaharah, H. A., & Rizky, L. (2022). Penguatan Peran Politik Perempuan Di Negara Dunia Ketiga : Studi Kasus Di Bangladesh. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 14(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i1.6376>
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (II). Colorado: Westview Press.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Walters, M. (2021). *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Y. R., Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>